

## Peran Perempuan Tunisia dalam Politik Pasca-Arab Spring Melalui Telaah *State Feminism*

Ayu Maulida Alkholid, Firmanda Taufiq

Kajian Timur Tengah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
e-mail: ayumaulidaalkholid@gmail.com, firmandataufiq@gmail.com

### Abstract

*Tunisia is one of the Arab countries hit by political upheaval in the Arab Spring era. The country is considered successful through a relatively stable political transition from authoritarianism to democracy. In this process, Tunisian women have a significant role. This paper aims to describe the feminist movement, which was spearheaded by both the state and women, plays an essential role in the political constellation of Tunisia. Tunisian women had an important role in inviting and mobilizing the masses when the Arab Spring erupted. Post-Arab Spring, they were effectively involved in the political process, including drafting laws in parliament. The law ratified in 2014 is seen as more guaranteeing gender justice. This research was conducted with a qualitative method that utilizes literature studies and implements the concept of state feminism. The results of this study conclude that state feminism has changed the pattern of the political system to be more accommodating to the interests and rights of women and seek to create gender justice in Tunisia.*

**Keywords:** Arab Spring, state feminism, Tunisia, woman

### Abstrak

Tunisia merupakan salah satu negara Arab yang dilanda pergolakan politik di era Arab Spring. Negara ini dianggap berhasil melalui transisi politik dari otoritarianisme ke demokrasi dengan relatif stabil. Dalam proses ini, kaum perempuan Tunisia memiliki peran yang signifikan. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan gerakan feminisme, yang dipelopori baik oleh negara maupun perempuan, berperan penting terhadap konstelasi politik Tunisia. Para perempuan Tunisia memiliki peran penting dalam mengajak dan memobilisasi massa ketika meletusnya Arab Spring. Pasca-Arab Spring, mereka terlibat dengan efektif dalam proses politik, termasuk dalam penyusunan undang-undang di

parlemen. UU yang diratifikasi tahun 2014 dipandang lebih menjamin keadilan gender. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang memanfaatkan studi literatur dan mengimplementasikan konsep *state feminism*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *state feminism* telah mengubah pola sistem politik menjadi lebih mengakomodasi kepentingan dan hak-hak perempuan, serta mengupayakan terciptanya keadilan gender di Tunisia.

**Kata kunci:** Arab Spring, perempuan, *state feminism*, Tunisia.

## Pendahuluan

Gelombang aksi massa Arab Spring 2011 dimulai dari Tunisia hingga menyebar ke berbagai negara lainnya di kawasan Timur Tengah. Awal mula munculnya Arab Spring di Tunisia dipicu oleh protes yang dilakukan oleh seorang pedagang buah, Mohamed Bouazizi dengan cara membakar diri. Aksi Bouazizi merupakan tindakan protes terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintahan Zine El Abidine Ben Ali. Pasca terjadinya Arab Spring, konstelasi politik di Tunisia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Di antara negara-negara lainnya yang mengalami Arab Spring, Tunisia dianggap satu-satunya yang sukses dalam transisi politik. Kondisi ini dinilai sebagai “*the only success story among the revolutionary states*”. Tunisia menunjukkan transisi politik dari *politics from above* menuju *politics from below* (Esposito, Sonn & Voll, 2016; Saidin & Alfitri, 2020:55).

Selama terjadinya revolusi Arab Spring di Tunisia, peran dan kontribusi perempuan dalam upaya mobilisasi demonstrasi dan aksi massa di jalanan untuk menentang kekuatan rezim Zine El Abidine Ben Ali (selanjutnya akan disebut ‘Ben Ali’) sangat signifikan. Mereka juga memanfaatkan platform media sosial untuk menyuarakan pendapat agar rezim otoriter Tunisia dapat diturunkan. Pasca-Arab Spring, perempuan Tunisia juga terus memperlihatkan kiprahnya. Misalnya saja, kehadiran perempuan dalam *Majlis Nuawwab al-Sha’b* atau parlemen Tunisia. Selain itu, selama Tunisia dipimpin oleh Moncef Marzouki sebagai presiden pertama pasca Arab Spring, kelompok perempuan memiliki peran penting dalam konstelasi politik, terutama dalam pemilihan umum (pemilu). Hasil pemilu menunjukkan bahwa sebanyak 30 persen perwakilan yang dipilih rakyat berasal dari kelompok perempuan (Saidin dan Alfitri, 2020). Kondisi tersebut jelas menunjukkan bahwa perempuan memiliki peranan dalam konstelasi politik di Tunisia.

Beberapa peneliti telah menulis kajian seputar fenomena ini, antara lain Mohd Irwan Syazli Saidin dan Nur Amira Alfitri menyebutkan bahwa ada keterkaitan antara

*state feminism* dan perjuangan perempuan di Tunisia pasca Arab Spring (Saidin dan Alfitri, 2020: 54-64). Zulfikar Ismail dan Maisyarah Rahmi Hasan telah menulis terkait modernisme legal Islam dan emansipasi perempuan di Tunisia. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa ada peran interpretasi modern syariah atas emansipasi perempuan yang terjadi di Tunisia. Meskipun Tunisia adalah negara Muslim yang sangat dipengaruhi oleh mazhab Maliki, namun situasi dan kondisi sosial, budaya, dan politiknya kondusif untuk mewujudkan terjadinya emansipasi perempuan. Bukan hanya itu, upaya modernisasi hukum Islam juga dilakukan dengan disahkannya undang-undang yang menjamin persamaan hak perempuan dalam hukum dan kebijakan negara (Ismail dan Hasan, 2020).

Penelitian lainnya terkait feminisme dan perempuan, serta keterlibatannya dalam politik, ditulis oleh Amel Grami. Dia membahas persoalan perempuan, feminisme, dan politik pasca revolusi Tunisia. Menurutnya, perempuan memegang peranan penting dan berkontribusi atas tumbangannya rezim Ben Ali yang telah memerintah selama kurang lebih 30 tahun (Grami, 2018: 23-56). Selanjutnya, penelitian yang dibuat oleh Najet Limam Tnani mengulas bagaimana keadaan perempuan Tunisia ketika berada di persimpangan jalan, terutama dalam konstelasi *Feminist Spring* dan *Islamist Winter*. Dalam hal ini, Tnani mengkaji keterkaitan perempuan Tunisia dan diskursus feminisme, serta Islamisme yang terjadi di negara tersebut. Selain itu, pada masa kekuasaan Bourguiba dan Ben Ali, mereka dinilai telah mengakomodasi feminisme dan sekularisme dalam pemerintahan (Tnani, 2020).

Meski demikian, berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di atas, di dalam tulisan ini penulis berusaha melacak bagaimana keterlibatan aktivis perempuan Tunisia pasca-Arab Spring dalam mengakomodasi hak-hak perempuan dalam konstitusi negara. Upaya penelusuran ini dilakukan sebagai usaha untuk melihat peran perempuan sebagai aktor di balik terjadinya Arab Spring yang kurang mendapatkan perhatian dalam diskursus revolusi Arab. Artikel ini ditulis untuk mengkaji fenomena tersebut dengan menggunakan pendekatan *state feminism* sebagai alat analisis.

### **State Feminism**

Konsep feminisme sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai gerakan perempuan untuk menuntut persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Hal ini merupakan penggabungan dari doktrin atas hak kesetaraan (Hidayati, 2019: 23). Sementara itu, dalam pandangan Margaret Walters disebutkan bahwa feminisme berkembang sesuai dengan perkembangan zaman (Walters, 2005: 6).

Feminisme muncul dilatarbelakangi oleh ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan munculnya kesadaran dan usaha untuk menghilangkannya (Hidayati, 2019: 23).

Sementara itu, *state feminism* diartikan sebagai konsep mengenai peranan dan tanggung jawab negara dalam memperbaiki status perempuan. Konsep ini berkembang dalam kurun waktu gelombang kedua feminisme di Eropa (Outshoorn dan Kantola, 2007). Dalam sejarahnya, pendekatan *state feminism* didiskusikan dan diulas untuk mengamati politik gender yang terjadi di negara-negara Nordik, seperti halnya Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Denmark pada awal tahun 1980-an. Sementara konsep *state feminism* awal mulanya dipelopori oleh Helga Hernes (1989) dalam bukunya yang berjudul *Welfare State and Women Power: Essays in State Feminism*. Menurut Hernes, tanpa adanya dominasi dan campur tangan negara yang didominasi oleh pihak laki-laki, kelompok perempuan dinilai terpinggirkan dalam proses pemilihan dan pembuatan dasar negara. Selain itu, isu-isu mengenai kedudukan, keadilan, dan hak asasi perempuan juga dibahas lebih mendalam olehnya.

Oleh karena itu, *state feminism* dinilai sesuai untuk digunakan dalam menganalisis persoalan mengenai peran negara dan keterlibatan perempuan dalam proses revolusi yang berkecamuk di Tunisia. Tunisia juga dinilai telah melalui fase peralihan dari sistem otokrasi menuju sistem demokrasi. Maka, pendekatan *state feminism* dapat diimplementasikan untuk mengamati perjuangan keadilan sosial atas kelompok perempuan di Tunisia.

### **Diskursus Perempuan dan Arab Spring**

Peristiwa Arab Spring merupakan titik balik bagi Tunisia. Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh ketidakadilan yang dilakukan oleh para pemimpin negara yang bersifat otoriter, korup, dan diktator. Seorang pemuda pedagang buah yang bernama Muhammad Bouazizi melakukan aksi bakar diri dan akhirnya memicu ketegangan yang membuat Presiden Ben Ali tumbang setelah berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Bukan hanya otoriter, keluarga besar Ben Ali juga diduga telah melakukan tindakan korupsi (Anderson, 2011:3).

Diperlukan identifikasi yang mendalam dan evaluasi atas terjadinya Arab Spring, terutama kondisi sosial dan destabilisasi politik yang terjadi di beberapa negara yang terdampak. Berbagai faktor tersebut di antaranya yakni karena situasi dan kondisi yang melatarbelakangi meletusnya peristiwa Arab Spring dan elit politik yang terlibat dalam pemerintahan. Sehingga, kondisi ini membuat terjadinya Arab Spring tidak lepas dari

strategi dan kebijakan para pemimpin negara yang akhirnya berdampak pada meletusnya revolusi (Korotayev, et al., 2014:152).

Selanjutnya, rezim otoriter yang selama ini memimpin pemerintahan pada dasarnya menerapkan sektarianisme politik dan agama agar mereka tetap menjadi presiden. Hal ini menunjukkan bahwa strategi tersebut sukses dalam menjaga pemerintahan mereka tidak tumbang dan berusaha dengan berbagai cara untuk mempertahankan kekuasaannya (Anderson, 2013: 150). Kondisi ini membuat mereka sulit untuk ditumbangkan selama beberapa tahun ketika mereka berkuasa. Tidak hanya itu, tensi sosial yang melatarbelakangi upaya penumbangan pemimpin dan konflik yang terjadi di internal maupun eksternal yang membuat revolusi akhirnya mampu menjatuhkan para pemimpin di beberapa negara di Timur (Korotayev, et al., 2014:149).

Di lain pihak, fenomena baru dengan adanya term pos-Islamisme yang populer dikaji dan didiskusikan oleh para sarjana dalam melihat bagaimana gerakan Islamis dan kondisi sosial, serta kesempatan kelompok mereka dalam konstelasi politik (Holdo, 2017: 1). Beberapa kelompok Islamis, seperti Ikhwanul Muslim, Ennahda, dan gerakan-gerakan Islamis, serta beberapa partai politik yang berupaya masuk ke dalam pemerintahan dan mendirikan negara Islam. Inilah yang terjadi dalam konstelasi politik di Tunisia dan Mesir pasca meletusnya Arab Spring, dimana kelompok-kelompok Islamis berusaha untuk terlibat dalam agenda politik (Holdo, 2017:8).

Secara umum, pasca demokratisasi Arab, ada tiga kelompok utama yang terbentuk, yakni nasionalis, sekularis, dan Islamis (Ghanem, 2016:39. Jika dilihat secara historis, kelompok gerakan nasionalis Arab telah memulai gerakan mereka pada abad ke-19, yaitu sebagai reaksi terhadap kolonialisme Eropa. Pada tahun 1956, Tunisia meraih kemerdekaannya dari Prancis dan awalnya berbentuk kerajaan. Pada tahun 1957, Perdana Menteri Habib Bargouiba membubarkan sistem kerajaan dan mendirikan Partai Destour. Partai ini menjadi partai nasionalis yang berkuasa di Tunisia. Habib Bargouiba berkuasa hingga 31 tahun kemudian, lalu digantikan oleh Ben Ali pada tahun 1987. Ben Ali terguling pada tahun 2011 sebagai akibat dari aksi-aksi protes massa yang menolak kepemimpinannya.

Kebijakan Bargouiba (dan kemudian dilanjutkan oleh Ben Ali) secara umum dipandang sebagai kebijakan sekuler. Hal ini terlihat dari kebijakan mereka yang merepresi aktivitas kelompok Islamis. Aktivis perempuan dari kalangan Islamis di Tunisia memprotes kebijakan yang melarang jilbab dan kebebasan beragama, serta sikap represif rezim terhadap mereka (Mhajne & Brandt, 2020). Bargouiba memberlakukan *the Code of Personal Status (CPS)* sejak tahun 1956, dimana kaum perempuan Tunisia mendapatkan hak-hak dalam kehidupan privat dan memfasilitasi partisipasi mereka

dalam kehidupan publik. CPS melarang poligami, mensyaratkan persetujuan laki-laki dan perempuan ketika akan menikah, dan memberikan laki-laki dan perempuan hak yang sama untuk menggugat perceraian. Tahun 1957, perempuan Tunisia diberi hak untuk memilih dalam pemilu. Hingga kini, tingkat pendidikan perempuan Tunisia sejajar dengan laki-laki dan bahkan mayoritas mahasiswa adalah perempuan. Banyak perempuan yang memiliki posisi pengambil keputusan di sektor-sektor publik dan privat (FIDH, 2013).

Namun demikian, rezim Ben Ali yang telah berkuasa 24 tahun dengan cara yang otoriter, korup, dan diktator, memunculkan resistensi dan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat. Terlebih lagi, kondisi ekonomi yang semakin sulit dan besarnya kesenjangan ekonomi, semakin memunculkan kemarahan rakyat dan mereka menghendaki perubahan rezim. Dalam hal ini, peran perempuan Tunisia sangat signifikan. Kita dapat melihat bagaimana para perempuan turun ke jalan untuk menumpahkan kemarahan dan ketidakpuasannya atas pemerintahan Ben Ali (Khalil, 2014:188).

Pada tanggal 14 Januari 2011 menjadi momentum penting dimana politik Tunisia berubah. Demonstrasi terjadi di jalan-jalan, tempat-tempat strategis, dan berbagai lokasi penting bagi para demonstran untuk menyuarkan hak dan pendapatnya, dan berupaya menumbangkan kekuasaan rezim. Para perempuan berperan dalam mengumpulkan massa, menyebarkan pesan, dan menuntut perubahan atas tindakan rezim yang sewenang-wenang. Blogger, jurnalis, aktivis, serikat pekerja, pelajar, dan ibu-ibu dimobilisasi untuk turun ke jalan untuk menyerukan pengunduran diri Ben Ali. Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube pun menjadi alat untuk menyuarkan hak-hak mereka. Berbagai kalimat kritik mereka lontarkan dalam upaya untuk menumbangkan rezim. Mereka menyatukan suara untuk melawan segala ketidakadilan, tindakan korupsi, otoriterianisme, dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh rezim Ben Ali (FIDH, 2013).

Salah satu aktivis Tunisia yang terkemuka adalah seorang Lina Ben Mhenni. Ia berperan dalam upaya menentang rezim Ben Ali melalui buku yang dia tulis, *Tunisian Girl, Bloguesuse Pour Un Printemps Arabe*. Namun, upaya tersebut ditentang dan disensor oleh rezim Ben Ali dengan segala cara. Meski demikian, Mhenni tetap menggunakan akun media sosialnya untuk melakukan perlawanan untuk menumbangkan rezim Ben Ali (Salanova, 2012).

Dalam aksi-aksi demo ini, para perempuan menjadi sasaran atas kekerasan polisi, termasuk tindak pelecehan seksual dan pemerkosaan. Berdasarkan data dari Asosiasi Tunisienne Des Femmes Democrats (ATFD), pada 11-12 Januari 2011 para gadis di Kasserine dan Thela diperkosa oleh anggota pasukan Ben Ali. Sementara di Tunis, pada

14-15 Januari para pengunjung rasa dari kelompok perempuan diperkosa saat mereka ditahan di Kementerian Dalam Negeri (FIDH, 2013).

Kaum perempuan dari kalangan Islamis juga berperan dalam aksi-aksi demo ini karena sejarah panjang represi yang mereka alami. Rezim Zine El Abidine Ben Ali menolak adanya partai politik yang mengatasnamakan agama seperti halnya Partai Ennahda. Banyak aktivis politik Ennahda yang dipenjara dan sebagian lainnya melarikan diri ke Eropa untuk mendapatkan perlindungan politik (Amara, 2016). Represi terhadap aktivisme Islam inilah yang menjadi motivasi bagi para perempuan yang berhaluan Islamis untuk ikut berjuang menolak rezim Ben Ali. Mereka juga memiliki inisiatif pribadi dan saling memberikan bantuan selama proses revolusi ini, seperti membantu menyediakan sumber makanan untuk para masyarakat yang terdampak akibat demonstrasi massa.

Dari berbagai peristiwa yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa perempuan memiliki arti penting dalam mendukung gerakan aksi massa di Tunisia hingga akhirnya rezim Ben Ali tumbang.

### **State Feminism dan Konstelasi Politik Tunisia Kontemporer**

Pasca-Arab Spring, perempuan Tunisia terlibat kembali dalam konstelasi politik. Pada 23 Oktober 2011 diadakan pemilihan umum, yang disebut-sebut sebagai pemilu pertama yang bebas dan demokratis di Tunisia. Dalam pemilu ini, Partai Ennahda mendapatkan kemenangan terbanyak, yaitu meraih 89 kursi dari 217 kursi di parlemen (Saidin dan Alfitri, 2020:58). Dari 217 kursi di parlemen, perempuan mendapatkan 59 kursi atau 27,2%. Dengan kemenangan ini para perempuan mampu berkontribusi dalam politik Tunisia. Menurut FIDH (2013), “Meskipun para pihak berkewajiban untuk menghormati aturan yang mengharuskan paritas calon laki-laki dan perempuan dalam daftar pemilih, hanya sedikit yang menempatkan perempuan di daftar teratas, membatasi efek dari undang-undang ini.” Tetapi, Tunisia tetap menjadi negara dengan proporsi perempuan tertinggi di parlemen di Timur Tengah. Sementara itu, dalam pemerintahan baru yang dibentuk tahun 2011, ada 3 menteri perempuan, yaitu menteri lingkungan, menteri urusan perempuan dan keluarga, dan menteri perumahan. Di masa Ben Ali sebelum terguling, ada 4 menteri perempuan. Dengan demikian, keberadaan menteri perempuan bukan hal baru di Tunisia.

Kemenangan partai Islamis Ennahda memunculkan kekhawatiran dari kalangan feminis. Partai ini pun memberikan pernyataan-pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka *concern* pada keadilan gender. Rachid Ghannouci, pendiri Partai Ennahda,

menyatakan visinya yang berlandaskan Islam yang diusung oleh partai mereka. Partai Ennahda mampu menjadi gerbong perubahan di tengah kompleksitas persoalan Tunisia pasca revolusi. Tidak hanya itu, mengenai isu keadilan dan persamaan gender juga menjadi salah satu isu prioritas selama kepemimpinan Ennahda yang memenangi pemilihan parlemen. Partai tersebut menjadi salah satu aktor penting pasca revolusi dalam mengawal transisi politik di Tunisia (Taqwa dan Kurniawan, 2017: 31).

Meskipun demikian, kaum feminis tetap mencatat keluhan mereka terhadap pemerintahan baru yang didominasi kelompok Islamis. Antara lain, seperti ditulis oleh FIDH (2013), pemerintah baru terlihat lambat bereaksi terhadap kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh kelompok Salafi, misalnya serangan terhadap rumah bordil di ibu kota dan serangan terhadap perempuan guru dan mahasiswa di universitas. FIDH dengan mengutip laporan ATFD, menulis bahwa ada individu-individu yang memaksakan penggunaan hijab, misalnya di Universitas Manouba di Tunis. Mereka juga meminta adanya pemisahan ruang kelas berdasarkan jenis kelamin di kampus tersebut.

Namun demikian, aktivis politik perempuan Tunisia terus berupaya melakukan konsolidasi melalui jalur formal maupun informal. Dalam laporan yang dirilis UNDP, disebutkan, “Banyak perempuan membangun konsensus dan mendorong proses ke depan di tengah perselisihan mendalam antara mayoritas partai Ennahda dan partai-partai oposisi yang didominasi sayap kiri.” Para aktivis perempuan Tunisia pun berhasil menjalin konsolidasi lintas kelompok dengan cara berfokus pada persamaan untuk memajukan kepentingan bersama (Tamaru, Holt-Ivry, O’Reilly, 2018).

Pada bulan Januari tahun 2014, parlemen Tunisia akhirnya meratifikasi konstitusi baru negara itu. Ini adalah peristiwa penting dalam pembelaan isu perempuan karena undang-undang tersebut menjamin keadilan dan persamaan gender. Peran perempuan dalam upaya ratifikasi ini dilakukan oleh para ahli parlemen, mereka adalah wakil dari Troika, yakni gabungan dari Partai Ennahda dan Ettakol, di antaranya adalah Sayida Ounissi, Imen bin Muhammad, dan Lobna Jeribi. Mereka berupaya untuk membawa Tunisia menjadikan negara yang lebih inklusif, adil, dan sejahtera.

Menurut laporan riset yang dirilis UNDP, “Kaum perempuan memainkan peran kritis dalam menetapkan agenda dan penggerak substantif wacana konstitusional.” Kaum perempuan Tunisia di parlemen berhasil memobilisasi konstituen mereka dalam isu ketidaksetaraan gender dan kesenjangan politik. Ratifikasi UUD tahun 2014 ini merupakan bukti bahwa melalui kepemimpinan dan langkah nyata, kaum perempuan Tunisia dapat menjadi aktor politik yang efektif (Tamaru, Holt-Ivry, O’Reilly, 2018).

Penandatanganan ratifikasi undang-undang itu juga menjadi penanda bahwa adanya perubahan signifikan dalam politik Tunisia, terutama keterlibatan perempuan

dalam arena politik. Faktor utama di balik kesuksesan tersebut adalah karena adanya komitmen dari para aktivis wanita yang mewakili badan-badan bukan negara seperti National Dialogue Quartet, Tunisia General Labour Union (UGTT), Tunisian's Human Rights League, Marhama Association, dan Jasmine Foundation. Beberapa organisasi tersebut telah terlibat secara tidak langsung dalam proses perundingan dan penyediaan rancangan perlembagaan 2014, yaitu dengan menyampaikan tuntutan-tuntutan perempuan terhadap pihak negara (Saidin dan Alfitri, 2020: 59).

Peranan para aktivis dan politikus perempuan dalam memperjuangkan hak perempuan tidak dapat dinafikan dalam proses politik Tunisia. Transisi politik pasca revolusi juga menunjukkan bagaimana topik dan isu terkait perempuan diangkat. Bahkan, meski terjadi perbedaan pendapat dan paradigma berpikir, kalangan perempuan Islamis maupun sekularis berjuang dan bersatu padu di tengah berbagai persoalan dalam kedudukan dan status perempuan di Tunisia. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Tunisia telah membuka jalan bagi perempuan untuk ikut andil dalam ruang politik.

Selain itu, bentuk keterlibatan perempuan pasca revolusi juga berubah. Jika di masa revolusi mereka turun ke jalan, akan tetapi pasca revolusi mereka lebih mengarahkan pada upaya perundingan dan berbagai keputusan dalam kebijakan terkait hak-hak perempuan. Namun demikian, bukan berarti kondisi perempuan Tunisia sudah ideal pasca-Arab Spring. Menurut Eltahawy (2018), perempuan Muslim maupun Kristen masih disandera oleh undang-undang keluarga yang disetujui secara agama yang seringkali sangat misoginis. Hal ini, menurut Eltahawy, merupakan fenomena yang tragis mengingat kaum perempuan telah bergabung dengan revolusi, namun setelah kemenangan revolusi, laki-laki tetap mendominasi.

Karena itu, pada pasca revolusi, masyarakat Tunisia, terutamanya golongan perempuan berupaya keluar dari penindasan yang mereka hadapi dan terus bersuara, serta memainkan peranan aktif dalam proses pembuatan legislasi agar dapat mengakomodasi kepentingan perempuan. Di sinilah peran dari *state feminism*. Di satu sisi, *state feminism*, atau upaya pemerintah/negara untuk mendukung feminisme dan perlindungan yang lebih besar terhadap perempuan telah membuat Tunisia menjadi sebuah negara yang mengangkat kedudukan wanita melalui perubahan mekanisme perundangan yang disebut *Code of Personal Status (CPS)*. Keberadaan CPS merupakan kemajuan besar bila dibandingkan dengan negara-negara Arab-Muslim lainnya. *State feminism* merupakan faktor semakin menguatnya wacana hak asasi dan kedudukan perempuan pasca revolusi Arab Spring di Timur Tengah.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, di masa Presiden Bourguiba dan kemudian dilanjutkan oleh Zine El Abidine Ben Ali, *state feminism* di Tunisia terlihat menguat dengan pemberlakuan CPS. CPS sangat dipuji oleh para pendukung feminisme. Misalnya, Dakhliia menulis, “Di mata orang Prancis yang memiliki pengetahuan luas, kebesaran Bourguiba dan Tunisia adalah dari status perempuan dan sekularisme,”(Dakhliia, 2011). Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Bourguiba juga dipengaruhi oleh Zaman Pencerahan, di mana dia berupaya mendirikan negara modern dengan memperkenalkan reformasi mendasar, termasuk di dalamnya memutuskan hubungan dengan beberapa lembaga hukum dan keagamaan dari era Beys. CPS juga dilanjutkan pada era Zine El Abidine Ben Ali. Namun demikian, kaum Islamis berkeberatan dengan kebijakan sekuler ini, terutama terkait dengan pelarangan hijab bagi perempuan (Mhajne & Brandt, 2020) dan aksi-aksi sekuler lainnya, seperti melakukan pembongkaran atas masjid dan Universitas Ez-Zeitona dan menggantinya dengan lembaga-lembaga sekuler milik negara (Tnani, 2020:36).

Dengan kata lain, Bourguiba dan Ben Ali dalam mempromosikan nilai-nilai sekuler mengenai pekerjaan dan pembangunan pada saat yang sama telah merugikan nilai-nilai dan praktik keagamaan. Namun, meski menerapkan berbagai kebijakan tersebut, keduanya tetap menggunakan simbol agama dalam berpolitik. Konstitusi Tunisia di pembukaannya memuat bahwa mengacu pada Tuhan dan menetapkan Islam sebagai agama negara. Bahkan, Bourguiba juga berupaya menggunakan tokoh dan simbol agama dalam berbagai pidatonya dalam rangka legitimasi politiknya.

Sementara itu, dalam persoalan terkait CPS, Bourguiba dan Ben Ali dinilai oleh sebagian kalangan telah ‘membebaskan perempuan’. CPS berupaya menghapus berbagai aspek syariah seperti halnya poligami, penolakan pernikahan, dan wali perkawinan. Sedangkan melembagakan pernikahan monogami dan perceraian yang egaliter, serta kontrasepsi yang dilegitimasi. Berdasarkan kode tersebut, perempuan diberikan banyak hak dan tidak terbatas dalam persoalan bekerja, bergerak bebas dalam memilih, dan mencalonkan diri. Kebijakan Bourguiba atas perempuan tersebut merupakan program yang diinisiasi dengan tujuan untuk memajukan perempuan dan dibuat sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan status perempuan di negara-negara Barat (Jomier, 2011).

Kebijakan Bourguiba dan Ben Ali merupakan bentuk dari *state feminism* atau praktik feminisme yang diinisiasi negara. Kebijakan mereka dirancang dengan bantuan para cendekiawan agama dan berdasar pada interpretasi Islam yang implementatif. Kode status pribadi sendiri dinilai tidak mempersoalkan pada entitas agama, patriarki, dan etika. Namun, pada akhirnya kebijakan yang dianggap modernis dan feminis tersebut kehilangan momentumnya dan mengalami fluktuasi dengan *status quo* politik.

Di masa rezim Bourguiba, di tahun 1970, dia berupaya menekan oposisi sayap kiri dan memuji warisan Islam Tunisia, serta mendukung partai-partai agama yang akhirnya mengubah wacananya di akhir 1980-an, saat dia berbicara mengenai oposisi Islam (Tnani, 2020: 37).

Pada masa Ben Ali, terjadi kebijakan yang paradoks. Awalnya, Ben Ali diharapkan bersikap tidak terlalu sekuler karena dia terlihat dekat dengan kalangan Islamis. Dia juga memanfaatkan simbol dan metafora Islam lebih besar dibandingkan pada masa rezim Bourguiba. Bahkan, dia juga menyampaikan pidato mengenai identitas Muslim Arab dan mengalahkan pengaruh media massa Islam lewat pendirian stasiun radio Zitouna (Tnani, 2020: 37). Dia meraih suara lebih dari 99% dalam pemilu 1989 (dua tahun setelah melakukan kudeta terhadap Bargouiba). Namun, tahun 1991, ia membubarkan Partai Ennahda dan melakukan pembungkaman terhadap kelompok Islamis (britannica.com).

Terkait isu feminisme, kebijakan sekuler Ben Ali melibatkan feminis elit yang tertarik dalam politik selama masa pemerintahannya. Pasca tumbangannya Ben Ali, kaum perempuan yang tidak memiliki afiliasi politik juga menyadari pentingnya peran dan kontribusi mereka dalam upaya membangun kembali negara yang carut-marut. Para perempuan Tunisia pasca kepergian Ben Ali, baik dari kalangan sekuler maupun Islamis mengambil keuntungan dari ruang publik. Berbagai usaha dan upaya para feminis yakni melakukan pertemuan, demonstrasi, dan pembentukan asosiasi feminis, serta mendirikan struktur partai, di mana tujuannya untuk memasukkan hak-hak perempuan ke dalam konstitusi baru. Dari situasi tersebut, revolusi Arab Spring telah memberdayakan perempuan Tunisia dalam mendefinisikan kembali posisi mereka dalam lanskap politik dan sosial di Tunisia.

Beberapa kebijakan yang menjadi perdebatan adalah upaya menghapuskan perkawinan beda agama dan kesetaraan hak warisan. Para perempuan sekuler berusaha menentukan nasib mereka sendiri dengan mengedepankan sekularisme. Sementara itu, para aktivis perempuan Islamis juga menyuarakan pendapat mereka. Aktivis Partai Ennahda, termasuk diantaranya Soumaya Ghannouchi, yang dengan tegas mengaitkan revolusi dengan pembebasan perempuan. Revolusi Arab Spring sesungguhnya tidak hanya telah menghancurkan struktur despotisme sampai ke akarnya, namun juga merobohkan mitos selama beberapa dekade. Dalam hal ini, persepsi perempuan Arab sebagai golongan yang tidak berdaya dan diperbudak, serta dipaksa untuk berdiam diri di rumah dan tidak ikut campur tangan dalam urusan politik perlu dilawan.

Partai Ennahda sebagai pemenang pemilu pasca-Arab Spring berupaya menampilkan citra Islam moderat. Menurut Mhajne & Brandt (2020) aktivis perempuan Ennahda mengangkat isu kebebasan politik, hak asasi manusia, dan demokrasi. Konsep-

konsep ini menjadi kerangka acuan aktivis perempuan Ennahda untuk menepis kekhawatiran masyarakat sekuler dan dunia internasional, yang sering menyebut mereka sedang “membangun negara Islam.” Mereka pun berhasil menjangkau para pemilih konservatif dan sekuler.

Namun, kemenangan kaum Islamis di Tunisia memicu gelombang kekecewaan dari kalangan sekuler. Mereka memprotes terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik selama revolusi atau pascarevolusi. Selama aksi-aksi demo, dilaporkan kasus-kasus dimana perempuan menjadi sasaran kekerasan verbal dan fisik oleh para kalangan Islamis, yang menganggap pakaian mereka tidak senonoh dan mengganggu atas kehadiran mereka di ruang publik. Persoalan yang muncul atas isu-isu perempuan, termasuk di antaranya terkait poligami yang dinilai merepresentasikan sebagai suatu solusi dalam permasalahan banyaknya perempuan yang masih lajang dan pernikahan adat pun muncul kembali dan dipraktikkan oleh beberapa kalangan Islamis.

Jika dilihat dari perspektif terkait hak-hak perempuan dan pelanggaran kebebasan mereka, maka akan memicu adanya spektrum yang lebih luas dari sekadar reaksi dari individu, tetapi juga secara kolektif. Bahkan, peran perempuan dalam politik diwakili oleh Partai Ennahda, di mana mereka menuntut syariah harus disebutkan dalam konstitusi dan diadopsi dalam sumber legislasi, dan prinsip saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan harus menggantikan tentang persoalan gender (Tnani, 2020: 41).

Dalam dualisme pandangan ini (antara sekuler dan Islamis), kaum perempuan Tunisia tetap mengupayakan keterlibatan mereka dalam menyusun legislasi, yang dapat kembali memunculkan *state feminism*, yaitu adanya feminisme yang secara resmi menjadi kebijakan negara. Sebagaimana disebutkan dalam laporan riset yang dirilis UNDP, pada bulan Januari 2014, Tunisia meratifikasi “konstitusi paling progresif di dunia Arab,” yang menandai tonggak utama dalam proses transisi damai negara ini dari rezim diktator ke demokrasi. Meskipun di dalam teksnya masih ada hal-hal yang ambigu dan meninggalkan ruang untuk interpretasi, namun ini adalah sebuah kemajuan (Tamaru, Holt-Ivry, O’Reilly, 2018).

Masih di laporan yang sama disebutkan bahwa, “Meskipun ada beberapa kemunduran, dan bahkan perselisihan politik yang akut berlanjut, wanita dan sekutu pria mereka terus berlanjut untuk berkolaborasi untuk menghidupkan konsitusi ini,” Tamaru, Holt-Ivry, O’Reilly, 2018).

## Simpulan

Kaum perempuan Tunisia memiliki peran signifikan dalam revolusi di era Arab Spring yang mengakibatkan tergulingnya rezim Ben Ali. Keterlibatan perempuan dalam revolusi ini lahir akibat berbagai ketidakadilan dan diskriminasi yang mereka alami. Selain itu, pemikiran dan kedudukan perempuan juga masih dikekang dan dibatasi oleh budaya patriarki di Tunisia. Oleh karena itulah para perempuan di Tunisia melakukan penentangan terhadap pemerintahan yang diktator, korup, dan otoriter.

Artikel ini menelaah keberhasilan perjuangan perempuan Tunisia dalam revolusi dengan menggunakan *state feminism*, atau feminisme yang didukung oleh negara. Di masa pemerintahan Ben Ali (dan sebelumnya, Bargouiba), telah diberlakukan undang-undang yang progresif memberikan perlindungan kepada hak-hak perempuan, yaitu melalui *the Code of Personal Status* (CPS). Namun demikian masih banyak aspek yang menjadi ganjalan, terutama dalam pandangan kaum Islamis. Mereka mengkritisi dilarangnya kebebasan untuk menggunakan hijab atau aturan yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Pasca-tergulingnya Ben Ali, dilakukan pemilu demokratis pada 23 Oktober 2011. Kaum perempuan berhasil mendapatkan 59 kursi di parlemen. Hal ini menunjukkan bahwa kaum perempuan Tunisia memiliki keterlibatan aktif dalam proses demokratisasi dan mereka berupaya melakukan perbaikan nasib kaum perempuan melalui legislasi. Dari pemaparan ini, dapat disimpulkan bahwa *state feminism* telah mengubah pola sistem politik menjadi lebih mengakomodasi kepentingan dan hak-hak perempuan, serta mengupayakan terciptanya keadilan gender di Tunisia.

## Daftar Pustaka

- Amara, T. (2016). Tunisian Islamists Ennahda move to separate politics, religion. *Reuters*, [online]. Dalam: <https://www.reuters.com/article/us-tunisia-politics-idUSKCN0YB2NO> [Diakses 3 Juli 2021].
- Anderson, C. W. (2013). Youth, the “Arab Spring,” and Social Movements. *Review of Middle East Studies*, 47(2), 150–156.
- Anderson, L. (2011). Demystifying the Arab Spring: Parsing the Differences Between RUTunisia, Egypt, and Libya. *Foreign Affairs*, 90(3), 2–7.
- Tamaru, N., Holt-Ivry, O., O’Reilly, M. (2018). *Beyond Revolution: How Women Influenced Constitution Making In Tunisia*. [online] Inclusive Security. Dalam:

- [https://www.inclusivesecurity.org/wp-content/uploads/2018/03/Beyond-Revolution\\_Constitution-Making-in-Tunisia.pdf](https://www.inclusivesecurity.org/wp-content/uploads/2018/03/Beyond-Revolution_Constitution-Making-in-Tunisia.pdf) [Diakses 3 Juli 2021].
- Eltahawy, M. (2018). Opinion | Seven years after the ‘Arab Spring,’ Tunisia is leading another revolution - on women’s rights. *The Washington Post*, [online]. Dalam: <https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/01/31/seven-years-after-the-arab-spring-tunisia-is-leading-another-revolution-on-womens-rights/> [Diakses 4 Juli 2021].
- Esposito, J. L., Sonn, T., dan Voll, J. O. (2016). *Islam and Democracy after the Arab Spring*. [online] Oxford University Press. Dalam: <https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780195147988.001.0001/acprof-9780195147988> [Diakses 3 Juli 2021].
- FIDH - *International Federation for Human Rights*, (2013). *Women and the Arab Spring: Taking their place ?* [online] Dalam: <https://www.fidh.org/en/issues/women-s-rights/Women-and-the-Arab-Spring-Taking,11550> [Diakses 30 Juli 2021].
- Ghanem, H. (2016). ‘Spring, but No Flowers’, in *The Arab Spring Five Years Later*. [online] Jstor. Dalam: <https://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctt1657tv8> [Diakses 3 Juli 2021].
- Grami, A. (2018). Women, Feminism and Politics in Post-Revolution Tunisia: Framings, Accountability and Agency on Shifting Grounds. *Warwick Feminist Dissent*, [online] (3), 23–56. Dalam: <https://doi.org/10.31273/fd.n3.2018.292> [Diakses 15 Agustus 2021].
- Hernes, H. M. (1989). *Welfare State and Woman Power: Essays in State Feminism*. Oxford: Norwegian University Press
- Hidayati, N. (2019). Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, [online] 14(1), 21–29. Dalam: DOI: 10.15408/harkat.v14i1.10403 [Diakses 7 Juli 2021].
- Holdo, M. (2017). Post-Islamism and fields of contention after the Arab Spring: feminism, Salafism and the revolutionary youth. *Third World Quarterly*, [online] 38(8), 1800–1815. Dalam: <https://doi.org/10.1080/01436597.2016.1233492> [Diakses 17 Juli 2021].
- Ismail, Z. dan Hasan, M.R. (2020). Islamic Legal Modernism and Women's Emancipation in Tunisia. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, [online] 19(2), 281-384. Dalam: <https://doi.org/10.21093/mj.v19i2.2800> [Diakses 17 Juli 2021]

- Jomier, A. (2011). Laïcité et féminisme d'Etat: le trompe-l'œil tunisien. *La Vie des idées*, [online]. Dalam: <https://lavedesidees.fr/Laicite-et-feminisme-d-Etat-le.html> [Diakses 15 Juli 2021].
- Khalil, A. (2014). Tunisia's women: partners in revolution. *The Journal of North African Studies*, [online] 19(2), 186–199. Dalam: <https://doi.org/10.1080/13629387.2013.870424> [Diakses 25 Juni 2021].
- Korotayev, A, V. et al. (2014). The Arab Spring: A Quantitative Analysis. *Arab Studies Quarterly*, [online] 36(2), 149–169. Dalam: <https://doi.org/10.13169/arabstudquar.36.2.0149> [Diakses 22 Juni 2021].
- Dakhli, J. (2011). Ben Ali: les ressorts de la complaisance française. *Le Monde*, [online]. Dalam: [https://www.lemonde.fr/idees/article/2011/01/21/ben-ali-les-ressorts-de-la-complaisance-francaise\\_1468722\\_3232.html](https://www.lemonde.fr/idees/article/2011/01/21/ben-ali-les-ressorts-de-la-complaisance-francaise_1468722_3232.html) [Diakses 15 Juli 2021].
- Mhajne, A., & Brandt, R. (2020). Rights, Democracy, and Islamist Women's Activism in Tunisia and Egypt. *Politics and Religion*, [online] 1–32. Dalam: DOI: <https://doi.org/10.1017/S1755048320000541> [Diakses 19 Agustus 2021].
- Outshoorn, J. and Kantola, J., (eds). (2007). *Changing State Feminism*. London: Palgrave Macmillan UK.
- Saidin, M. I. S. and Alfitri, N. A. (2020). "State Feminism" dan Perjuangan Wanita di Tunisia Pasca Arab Spring 2011. *International Journal of Islamic Thought*, [online] 12(1), 54–64. Dalam: [http://journalarticle.ukm.my/16352/1/IJIT-Vol-18-Dec-2020\\_6\\_54-64.pdf](http://journalarticle.ukm.my/16352/1/IJIT-Vol-18-Dec-2020_6_54-64.pdf) [Diakses 15 Juli 2021].
- Salanova, R. (2012). Social Media and Political Change: The Case of the 2011 Revolutions in Tunisia and Egypt. *SSRN Electronic Journal*, [online]. Dalam: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2206293](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2206293) [Diakses 27 Juni 2021].
- Taqwa, L. and Kurniawan, H. (2017). Peran Partai Al-Nahdhah Dalam Rekonsiliasi Politik Di Tunisia Tahun 2011-2015. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, [online] 4(1), 22–42. Dalam: DOI: <https://doi.org/10.7454/meis.v5i1.12> [Diakses 19 Agustus 2021].
- Tnani, N. (2020). Tunisian Women at the Crossroad: Between a Feminist Spring and an Islamist Winter. *Al-Raida Journal*, [online] 35–44. Dalam: <https://doi.org/10.32380/alrj.vi.1768> [Diakses 28 Maret 2021].

Walters, M. (2005). *Feminism. A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press